



Radar Bali

KORUPSI KAPAL



MAULANA SANDIJAYA/RADAR BALI

TOLAK BANTUAN; Anggota KUB Pula Kerti Ketut Sumara, menunjukkan surat kesepakatan menolak kapal bantuan dari Kementerian KKP.

Aspidsus Sebut Kantongi Calon TSK

MANGUPURA – Rencana penyerahan 7 unit kapal Inka Mina kepada kelompok nelayan di Buleleng dan Denpasar, tampaknya sulit terwujud. Lima kelompok nelayan di Buleleng yang telah menolak bantuan kapal sejak awal justru kian resah ■

► Baca *Aspidsus...* Hal 31

Calon TSK Korupsi Kapal Cukup Banyak

■ ASPIDSUS

Sambungan dari hal 21

Perwakilan kelompok nelayan ini pun *mesaduke* ke Kejati Bali, kemarin (22/2). Lima kelompok nelayan calon penerima bantuan kapal adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pula Kerti, KUB Bhakti Kusgoro, KUB Bakti Baruna, KUB Banyu Mandiri, dan KUB Hasil Laut.

Kesepakatan penolakan bantuan kapal dituangkan pada secarik kertas tulisan tangan. Ditemui Aspidsus Kejati Bali Polin. O Sitanggan dan Kasi Penuntutan Wayan Suardi, tiga orang perwakilan kelompok nelayan kembali menegaskan tidak mau menerima kapal. Alasannya kondisi kapal tidak laik pakai karena kualitasnya tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Jika dipaksakan nelayan khawatir kondisi kapal yang tidak laik akan menjadi bencana saat digunakan melaut. Selain itu, proyek kapal juga diduga berkasus dan kini masih disidik Kejati Bali.

"Kami datang ke Kejati Bali ingin menanyakan status kapal itu bagaimana. Biar kami sebagai calon penerima bantuan, tidak bermasalah hukum nantinya," ungkap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pula Kerti Ketut Sumara. Pria 43 tahun itu datang bersama anggota KUB Bhakti Kusgoro; Edy Suparlan dan KUB Bakti Baruna; Nyoman Werta Witama. Sumara menyatakan meski mendapat undangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, kelompok nelayan tetap tidak akan menerima bantuan kapal tersebut.

"Kalau mesin rusak bisa dan jaring bocor bisa diperbaiki. Tapi, kalau kapal rusak apakah bisa dilebur? *Kan* tidak mungkin," sindirnya. Menanggapi laporan serta keluhan nelayan, Polin. O Sitanggan

menjelaskan kejaksaan tidak bisa mengintervensi nelayan agar tidak menerima kapal.

Terkait pertanyaan nelayan tentang status hukum kapal, Polin menegaskan saat ini penyidik sedang menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Bali. Penghitungan kerugian negara ini penting untuk menetapkan tersangka, sekaligus memastikan adanya praktik korupsi. Kejati, lanjut Polin, sudah menggelar ekspose dengan BPKP dan tim ahli lainnya seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Hasil verifikasi BKI, tujuh kapal dinyatakan bahan material yang digunakan rekanan tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Dari hasil temuan BKI, hampir seluruh komponen kapal tidak sesuai spesifikasi. Diketahui dua rekanan yang mengerjakan kapal adalah PT. FI Perkasa dan CV. Fuad. Proyek ini dimulai sejak tahun 2013 lalu. Namun baru selesai pada tahun 2016. "Tapi, kami harus tetap menunggu kerugian negara dari BPKP Bali. Kami tidak ingin menetapkan tersangka tanpa bukti kuat," cetusnya. Ditanya kapan tersangka bisa diketahui, Polin kembali memberi jawaban diplomatis. "Kami berharap secepatnya hasil penghitungan BPKP selesai. Kalau itu selesai, maka sudah bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab," tukas pria berambut klimis itu.

Saat kembali dikejar siapa saja pihak yang berpeluang ditetapkan tersangka, Polin enggan membeberkan. Namun, dia menyebut sudah memiliki minimal dua alat bukti calon tersangka. Dari alat bukti itu diprediksi calon tersangka lebih dari satu orang. "Kalau dilihat hasil penyidikan, calon tersangkanya cukup banyak. Tapi, lihat saja nanti setelah semua alat bukti lengkap," bebernya. (san/mus)

Edisi : Kamis. 23 Feb 2017

Hal : 21 dan 31